



KATA PENGANTAR

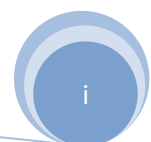
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022. Laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022.

Pembuatan LKjIP ini merupakan respon terhadap pelaksanaan otonomi daerah. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan pengukuran kinerja untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam proses penyusunannya, melibatkan berbagai pihak terutama yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksana teknis kegiatan.

Demikianlah laporan ini kami susun, kami harapkan adanya masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan LKjIP ini. Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami ucapkan terima kasih.

Muaro Sijunjung, Februari 2023
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sijunjung**

JAHERI, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19730311 199303 1 004





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PelayanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 menyajikan hasil-hasil kinerja yang dicapai selama tahun 2022 sebagai bahan evaluasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, yang harus mendapat perhatian secara terus menerus, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pada LKjIP juga dianalisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan ini yang memuat permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta analisis permasalahan dan solusi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan terwujudnya sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sekaligus mempersiapkan organisasi pembelanjaan yang merupakan paradigma baru bagi birokrasi seiring dengan meningkatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Evaluasi dan analisa juga disertakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan hasilnya digunakan untuk melakukan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya dengan lebih baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I		
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA	2
1.4. ISU STRATEGIS	3
1.5. LANDASAN HUKUM	4
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	5
BAB II		
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	7
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021- 2026	7
2.2. TUJUAN DAN SASARAN	7
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN	13
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	29
BAB III		
AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN DINAS PMPTSP	31
3.3. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2022	67
BAB IV		
PENUTUP	80
LAMPIRAN		



LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP.
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 secara berjenjang dari Eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan individu.
3. Cascading Kinerja/Pohon Kinerja Tahun 2021-2026
4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.
5. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022.
6. Rencana aksi kinerja sasaran tahun 2022.
7. Penghargaan yang diperoleh tahun 2022.



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan kebijakan tersebut setiap instansi pemerintah di seluruh tingkatan dituntut untuk mampu menyelenggarakan SAKIP yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, reviu dan evaluasi kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dan menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2022, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Tujuan dari penyusunan pelaporan kinerja tahunan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja



yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung ini berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

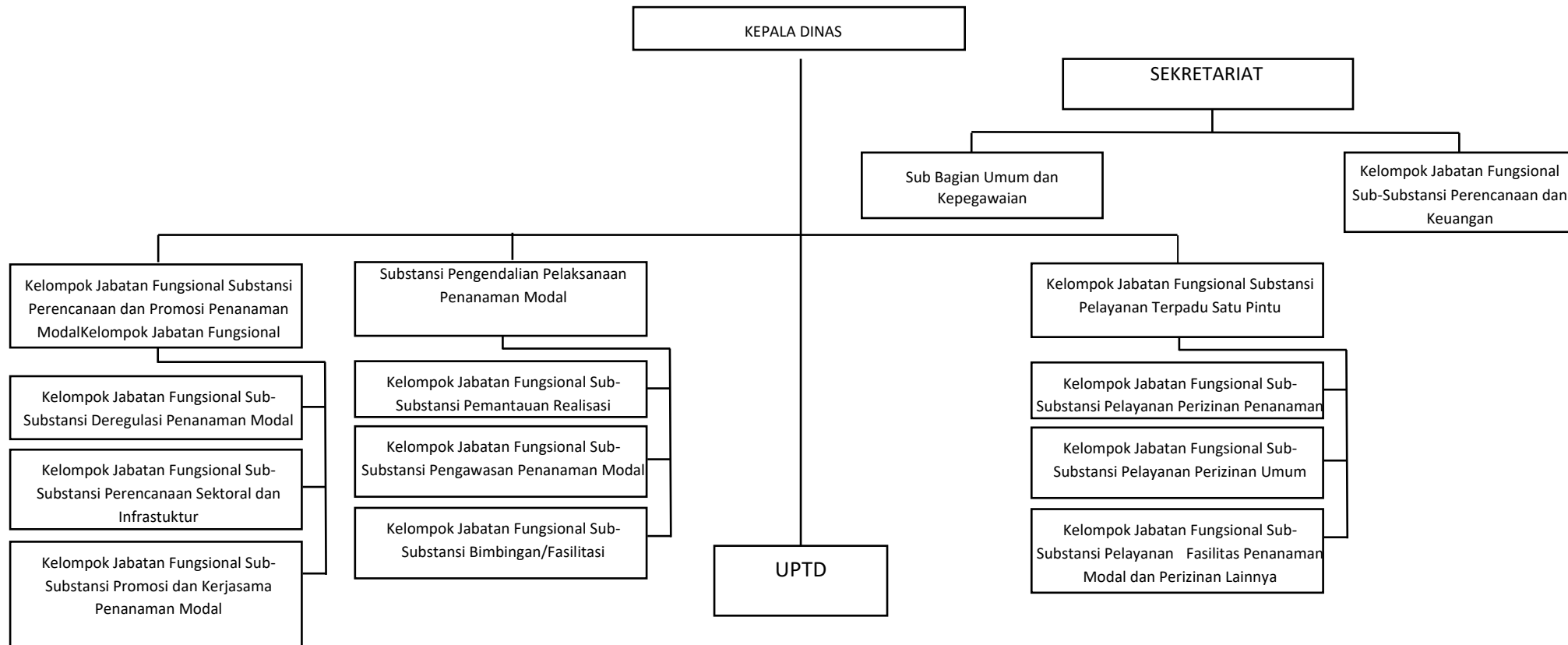
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dinas
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dinas
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG





1. Kepala Dinas.

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksana tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat terdiri dari ;

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Keuangan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan deregulasi penanaman modal, perencanaan sektoral dan infrastruktur serta promosi dan kerjasama penanaman modal.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan Penanaman Modal
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bimbingan dan fasilitasi

5. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan layanan Perizinan Penanaman Modal, Layanan Perizinan Umum serta Layanan Fasilitasi Penanaman Modal dan Perizinan lainnya
Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :



- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Perizinan umum.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal dan Perizinan lainnya.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 1.1
Gambaran Umum Kepegawaian DPMPPTSP
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah ASN	
	PNS	23
	Non PNS	20
2	Kualifikasi Pendidikan (PNS)	
	- S 2	4
	- S 1 / D 4	16
	- D I / D III	2
	- SLTA	1
3.	Kualifikasi Pendidikan (THL)	
	- S 2	-
	- S1/D4	16
	- D1/D3	1
	- SLTA	3
4.	Pejabat Struktural	
	- Eselon II.b	1
	- Eselon III.a	1
	- Eselon III.b	-
	- Eselon IV.a	1
	- Eselon IV.b	-



5.	Pejabat Fungsional	
	- Ahli Madya	3
	- Ahli Muda	9

Personil yang memperkuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 23 orang PNS dan 20 orang non PNS, dengan pendidikan dominan S1. Peningkatan kualitas personil dengan mengikuti bimbingan teknis, seminar dan kursus akan menambah pendidikan dan pelatihan di bidang tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel. 1.2
Jumlah ASN Kepegawaian per Kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretariat DPMPSTP Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (orang)				Jumlah Total (Orang)
		Sekretariat	Perenc Promosi	Pengendali an Pelaks	PTSP	
1	Jumlah ASN dan Non ASN	16	8	8	12	43
	PNS	7	5	5	6	23
	THL	9	3	3	6	20
2	Kualifikasi Pendidikan					
	-S2	3	1	-	-	4
	-S1/D4	10	7	6	10	31
	-DI/DIII	1	-	1	1	3
	-SLTA	3		1	1	5
3	Pejabat Struktural					3
	-Eselon.II.b	1	-	-	-	1
	-Eselon III.a	1	-	-	-	1
	- Eselon IV.a	1				1
4	Pejabat Fungsional					12
	- Ahli Madya		1	1	1	3
	- Ahli Muda	1	3	2	3	9

4. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena



dampaknya yang signifikan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa yang akan datang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa lima tahun mendatang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, isu strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah karena dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*masterplan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai.
- 2) Belum optimalnya regulasi tentang kemudahan berinvestasi.
- 3) Sering terkendala dalam mengakses aplikasi OSS dan siCANTIK sehingga memperlambat proses penerbitan izin.
- 4) Belum optimalnya proses pelayanan perizinan berusaha karena masih terjadinya keterlambatan dalam proses melengkapi persyaratan/pemenuhan komitmen perizinan.
- 5) Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM karena masih banyaknya pelaku usaha yang belum melaporkan realisasi investasinya.

5. LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Instansi pemerintah dan gambaran umum organisasi perangkat daerah dan personil perangkat daerah serta sistematika umum.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah tahun 2022 yang didasarkan pada sasaran indikator kinerja utama (IKU) sesuai keputusan kepala Perangkat Daerah dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala PD merupakan target kinerja tahunan pada PD sesuai dengan target kinerja pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2022. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Analisis capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan sasaran indikator kinerja utama (IKU) PD pada BAB II
2. Faktor pendorong serta hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU)
3. Langkah-langkah antisipatif yang diambil untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
4. Menyajikan efektifitas penggunaan anggaran untuk pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja utama PD Tahun 2022

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja perangkat



daerah tahun 2022 dan upaya yang akan dilakukan oleh PD untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

- Lampiran**
1. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
 2. Perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 secara berjenjang dari Esselon II,III,IV, pejabat fungsional dan individu/staf.
 3. Cascading Kinerja/Pohon Kinerja Tahun 2022
 4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.
 5. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022.
 6. Rencana aksi kinerja sasaran tahun 2022.
 7. Penghargaan yang diperoleh tahun 2022.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026 dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam Renstra dirumuskan Visi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 yaitu : **“Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani”**. Visi tersebut diatas merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang akan diwujudkan di Kabupaten Sijunjung.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung merupakan penjabaran dari setiap misi yang dilaksanakan. Keterkaitan antara misi dengan tujuan dan sasaran terdapat pada fungsi dari misi, tujuan dan sasaran tersebut. Misi memberikan acuan kerangka pelaksanaan secara strategis. Tujuan adalah suatu capaian yang mengarah pada sasaran. Sedangkan sasaran adalah efek yang ingin kita capai dari pencapaian suatu kondisi atau pemenuhan dan pencapaian tujuan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk mewujudkan Misi-1 RPJMD yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi” dan Misi ke-2 yaitu “Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata.”



Untuk mewujudkan Misi ke-1 dan Misi ke-2 pada RPJMD tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung telah menyusun tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan realisasi investasi
2. Meningkatkan kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif
3. Meningkatkan kinerja organisasi yang akuntabel

b. Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
3. Meningkatnya tata kelola organisasi

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah. IKU menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sijunjung merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra tersebut disepakati yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan realisasi penanaman modal
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan perizinan
3. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPSTP Tahun 2022

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	Persen	12	13	15	20	25	25
2.	Meningkatnya kinerja layanan public yang berkualitas dan inovatif	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan perizinan	Nilai	85	85.5	86	86.5	87	87.5
3.	Meningkatnya Kinerja organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	75	72	72.5	73	73.5	74



2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi untuk memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan.

Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan Arah Kebijakan Umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2022. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan utama (*strategis issued*) yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator kinerja yang disepakati sebagai perjanjian kinerja yaitu suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sijunjung (RPJMD) 2021-2026, Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 sebesar Rp5.434.139.827,00.



Berdasarkan alokasi Anggaran tersebut, maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai sasaran program yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah			100%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah			100%
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan



				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan			100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen (40 SPP, 40 SPM, 1500 SPJ)
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14 laporan
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	42 Paket
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang



				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah			100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Komponen
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	30 laporan



						dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik Daerah sesuai dengan perencanaan			
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 paket
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	3 Laporan



						Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang disediakan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	12 Laporan
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas lapangan yang dipelihara	13 Unit
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit
	Tercapainya Realisasi	Persentase	13%	PROGRAM PENGEMBAN	Persentase Penurunan			0%



Penanaman Modal	peningkat an realisasi Investasi		GAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pengaduan Pelaku Usaha			
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas jaminan kepastian hukum (regulasi) dan persentase fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal			100%
					Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda/ Perbup/ NA dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan potensi peluang investasi yang disusun			100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	Jumlah Investasi PMDN dan PMA			3 Investor



				MODAL	(Investor)			
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal			100%
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	85,5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan penerbitan perizinan penanaman modal yang diterbitkan ; Persentase pemenuhan standar Pelayanan Publik;			8;100%
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,5



				Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota				
						Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha
						Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan PM	10 Kegiatan Usaha
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	12 Orang
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Realisasi Investasi PMDN (Rp.Trilyun),			11,42 (Rp. Trilyun):19 7,4 (US\$ ribu)



				N PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi PMA (US\$ ribu)			
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Pemantauan pelaksanaan penanaman modal; Persentase Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; Persentase Pengawasan Pelaksanaan PM			100%;100% ;100%
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan PM	30 Kegiatan Usaha
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan PM	234 Kegiatan Usaha
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi	75 Kegiatan Usaha



							pengawasan	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan data dan informasi			81
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan			1 paket data (perizinan dan non perizinan); 1 dokumen
						Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 paket data (perizinan dan non perizinan)



2.5. Perjanjian Kinerja 2022

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, maka disepakati perjanjian kinerja antara penerima amanah dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada atasan langsungnya (Bupati) untuk tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022

Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Target SKPD
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	13%
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	85.5
3. Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	72

Tabel 2.4
Program DPMPTSP Tahun 2022

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.803.954.127,00	
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp130.315.750,00	
Promosi Penanaman Modal	Rp375.655.050,00	
Pelayanan Penanaman Modal	Rp.470.533.950,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp614.213.750,00	
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp39.467.200,00	
J U M L A H	Rp5.434.139.827,00	

Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung disajikan melalui laporan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam laporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target tingkat sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 maupun RKPD tahun 2022, sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dimana pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian sasaran strategis diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Range % Capaian	Kategori
1.	>90	Sangat Baik
2.	75.00 - 90	Baik
3.	65.00 – 74.99	Cukup
4.	50.00 – 64.99	Kurang
5.	0 – 49.99	Sangat Kurang

Secara Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai misi ke 1 dan misi ke 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung 2021-2026 serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021 terdapat 3 tujuan dan 3 sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama. Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA DINAS PMPTSP TAHUN 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Satuan	Target SKPD	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	persentase	13%	27.14 %	208.76 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya kinerja layanan public yang berkualitas dan inovatif	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	85.5	89.18	104.30	Sangat Baik
3	Meningkatnya kinerja organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	72			

Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2022

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2022

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :



1. Capaian jangka pendek yaitu perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021.
2. Capaian Jangka Menengah yaitu membandingkan antara realisasi tahun 2022 dengan target akhir RPJMD

Adapun Pengukuran Kinerja terhadap target tahunan (jangka pendek) dilakukan analisis terkait :

1. Program dan Kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilannya.
2. Permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tahun 2022 dan analisis perbandingan capaian dengan tahun 2021.

Sementara pengukuran kinerja jangka panjang dilakukan analisis terkait realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah

A. SASARAN STRATEGIS 1 : *Meningkatnya realisasi penanaman modal*

Untuk mewujudkan sasaran strategi 1 (satu) ***Meningkatnya realisasi penanaman modal*** dengan indikator kinerja Persentase peningkatan realisasi penanaman modal dengan target 13% terealisasi 27,14%, capaian 208,76% dengan kategori **Sangat Baik**.



Tabel 3.3
Realisasi Penanaman Modal Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Kategori (2022)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	12	43.30	360.83	13	27.14	208.76	Sangat Baik
Rata-rata capaian indikator							208.76	Sangat Baik

Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2022

Tabel 3.4
Data Realisasi Penanaman Modal Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Jumlah realisasi penanaman modal	923.347.659.031	1.323.173.155.036	1.682.367.971.730

Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat realisasi persentase peningkatan realisasi penanaman modal pada tahun 2022 adalah 27.14% dengan persentase capaian sebesar 208.76% dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaiannya 43.30% dengan capaian sebesar 360.83% dengan kategori sangat baik.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini:

1. Meningkatnya kesadaran dengan tepat waktunya perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2. Bertambahnya jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM.
3. Perusahaan merealisasikan rencana investasinya pada awal kegiatan di lapangan.
4. Terlaksananya kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini:

1. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah karena dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (masterplan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai



2. Belum optimalnya regulasi tentang kemudahan berinvestasi
3. Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM.
4. Masih adanya perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian Laporan LKPM
6. Masih adanya perusahaan yang belum mempunyai hak akses dalam penyampaian Laporan LKPM secara online karena belum melakukan migrasi data dari OSS 1.0 dan OSS 1.1 ke OSS RBA.
7. Masih adanya pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek perusahaan di Kabupaten Sijunjung

Strategi Pemecahan Masalah :

- 1) Melakukan survey Data potensi dan peluang investasi
- 2) Menyurati dan memberitahukan perusahaan dalam penyampaian laporan LKPM sesuai periode dan jadwal penyampaian laporan.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya dilapangan.
- 4) Memberikan bimbingan teknis dalam pengisian Laporan LKPM kepada perusahaan dengan melaksanakan LKPM keliling.
- 5) Memfasilitasi perusahaan dalam mendapatkan hak akses Pelaporan LKPM dengan mengedukasi dan membantu pelaku usaha untuk melakukan migrasi Data ke OSS RBA
- 6) Memberitahukan, mengarahkan dan membantu pelaku usaha menambahkan lokasi proyek bagi pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek di Kabupaten Sijunjung di dalam OSS RBA.

Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian sasaran ini adalah :

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis 1 “Meningkatnya realisasi penanaman modal” diupayakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran program : Meningkatkan kualitas iklim berinvestasi

Indikator Kinerja Program : Penurunan Pengaduan Pelaku usaha



Target : 0%

Capaian : 75%

1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatnya kondisi/iklim yang kondusif dalam berinvestasi

Indikator kinerja kegiatan : Persentase pemenuhan fasilitas jaminan kepastian hukum (regulasi) dan persentase fasilitasi kemudahan/insentif penanaman modal

Target : 100%

Capaian : 100%

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran Rp66.742.250,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp65.799.903,00 atau 98.59%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%.

- Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Perda/Perbup/NA dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

- Target dan Capaian Kinerja

Target dari sub kegiatan ini adalah 2 dokumen dengan capaian kinerja 2 dokumen.

- Bentuk Kegiatan

- Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data sebagai bahan dalam menyusun draft Peraturan Bupati dan Naskah Akademik Ranperda Penanaman Modal
- Melakukan rapat tim pembahasan draf penyusunan Peraturan Bupati dan Dokumen Naskah Akademik Penanaman Modal
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di Padang serta menyusun laporan kegiatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan sharing informasi dengan DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dan Instansi/lembaga lainnya

Gambar 3.1
Rapat/Forum Group Discussion (FGD) penyampaian saran dan masukan muatan materi terkait Rancangan Perda Penanaman Modal



2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatnya informasi terkait potensi penanaman modal

Indikator kinerja kegiatan : Persentase dokumen perencanaan potensi peluang investasi yang disusun

Target : 100%

Capaian : 100%

a. Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

• Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran Rp. 63.573.500,- dengan realisasi anggaran adalah Rp. 61.242.231,- atau 96,33% dan untuk realisasi fisik sebesar 100%.

• Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten

• Target dan Capaian Kinerja

Target dari sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen.

• Bentuk Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota tahun 2022 dimulai dengan melaksanakan koordinasi dan permintaan data potensi

investasi ke 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, dilanjutkan dengan membuat daftar potensi investasi lalu kunjungan survey dan pengambilan data ke objek lokasi potensi investasi. Sementara itu dibuat kerjasama untuk pekerjaan pembuatan WebGIS Potensi Investasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta, perjanjian kerja sama ini menghasilkan output berupa Aplikasi Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi (SIPOLIN) yang berisi data Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sijunjung yang terbagi dengan 7 (tujuh) sektor yaitu sektor Pertambangan dan Energi, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Industri dan perdagangan, Perikanan dan Perkebunan. Selain itu hasil kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota tahun 2022 juga dibuat sebuah dokumen berupa Profil Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang merupakan Rangkuman hasil Survey Potensi dan Peluang Investasi Tahun 2022.

- Permasalahan/kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah kurang kapasitas sumberdaya ASN yang mempunyai keahlian khusus untuk kegiatan ini seperti bidang ilmu Pembagunan Ekonomi Kewilayahan dan Ilmu Geografi, juga terbatasnya anggaran untuk kegiatan ini yang membutuhkan kajian untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas.

Gambar 3.2
Kegiatan Survey Potensi & Peluang Investasi





Kegiatan Pembuatan Video Promosi



Workshop dan Penyerahan Source Code Aplikasi SIPOLIN

2. Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran program : Meningkatnya kualitas promosi dan pengendalian penanaman modal

Indikator Kinerja Program : Jumlah Investasi PMDN dan PMA (Investor)

Target : 3 investor

Capaian : 3 investor

1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatnya promosi investasi daerah

Indikator kinerja kegiatan : Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal

Target : 100%

Capaian : 100%

a. Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran Rp375.655.050,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp355.848.374,00 atau 94,7%.

Untuk realisasi fisik sebesar 100%.

- Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten

- Target dan Capaian Kinerja

Target dari sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dan capaian kinerja adalah 1 dokumen.

- Bentuk Kegiatan

Apkasi Otonomi Expo 2022 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut



1. Dalam kegiatan ini DPMPTSP mengikuti pameran/event untuk memperkenalkan peluang investasi dengan menyajikan potensi investasi unggulan Kabupaten Sijunjung.

Materi dan bahan promosi stand disajikan dalam bentuk sampel barang, video, banner, buku, leftlet dan poster dengan potensi dan komoditi yang dipromosikan adalah sebagai berikut :

- a. Potensi investasi Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari Geopark Silokek, Potensi PLTA, Hilirisasi Karet, Hilirisasi Migas, batu granit, Batu Kapur, Mangan, Klasit, Batu Bara dan Biji Besi
- b. Komoditi produk hasil UMKM Kabupaten Sijunjung sebanyak 21 (dua satu) jenis, yakni Songket Unggan, Ceta Bacorak Stasiun dan Kumanis, Pataya Ecoprint, Tas Jali-jali, Tas, Sepatu dan Sandal Rajut, Kerupuk Kulit, Chiki Ikan, Garci tea, Pasak Bumi, Kopi Carano, Gula Semut, Jahe Merah, GalamaiUrang Awak, Kacang Madu, Rendang Cukbi, Keripik Pisang, Dendeng Cukbi dan Madu Galo-galo

2. Executive Dialogue

Kegiatan ini mempertemukan para penentu kebijakan, buyers, investor, dan pemerintah daerah dan para pelaku usaha lokal dalam sebuah dialog mengenai kebijakan-kebijakan perdagangan dan investasi dengan tema “Menggali Potensi Pendanaan Pembangunan Daerah dari Dana Publik dan Non Publik

3. Pada rangkaian kegiatan Bussines & Partnership Matching yang diikuti oleh DPMPTSP Kabupaten Sijunjung telah dapat membuka jaringan komunikasi dengan beberapa calon mitra usaha untuk pemasaran produk UMKM dan pengelolaan Potensi Investasi Daerah Kabupaten Sijunjung antara lain sebagai berikut :

- a. Gerai Kabupaten Lestari adalah perusahaan pemasaran virtual yang menghubungkan konsumen dengan produk lokal UMKM kabupaten di Indonesia
- b. Pipiltin Cocoa. Adalah merupakan perusahaan pengelolaan coklat asli Indonesia yang bekerjasama dengan petani.
- c. Sustaination adalah wirausaha sosial yang menjual produk lokal terakurasi dan ramah lingkungan.

- d. Nasi Peda Pelangi adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran/gerai untuk produk makanan khas daerah.
 - e. Potato Head adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran produk makanan dan minuman khas daerah dengan suasana Hospitality dan lifestyle.
 - f. Anomali Cofee adalah perusahaan kurator kopi yang menyediakan kopi dengan standar specialty dari petani kopi di seluruh Indonesia.
 - g. Gold Leaf Agro adalah perusahaan jasa ekspor yang bergerak di bidang penyediaan dan pendistribusian komoditas agro Indonesia seperti hasil produk karet.
 - h. Golden Terrac America adalah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor hasil pertambangan seperti Batubara, Mangan dan hasil tambang lainnya.
 - i. Kadin (Kamar Dagang Industri) dan
 - j. Ok OCE Expор adalah perusahaan yang bergerak di ekspor produk UKM terutama ke Singapura.
4. Keikutsertaan Kabupaten Sijunjung pada Apkasi Otonomi ExpO 2022 mendapatkan penghargaan katogori Stand/Booth terbaik kategori Informatif dengan sertifikat dan plakat.

Gambar 3.3
Pameran Apkasi Otonomi Expo 2022 di Jakarta Convetion Center



5. Pameran Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke 74 (Festival Lansek Manih)



Pameran/event untuk memperkenalkan peluang investasi dengan menyajikan potensi investasi unggulan Kabupaten Sijunjung.

Materi dan bahan promosi stand disajikan dalam bentuk sampel barang, video, banner, buku, leftlet dan poster dengan potensi yang dipromosikan antara lain Potensi investasi Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari Potensi PLTA, Hilirisasi Karet, Hilirisasi Migas, batu granit, batu kapur, mangan, klasit, batu bara dan biji besi

6. Forum Bisnis yang difasilitasi oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Hotel Balairung Jakarta Tahun 2022 dengan kegiatan Seminar, temu bisnis, dan sesi one on one meeting antara pemerintah kabupaten/kota dengan pelaku usaha/investor lokal maupun asing. Hasil dari forum bisnis ini telah ditindaklanjuti bersama calon investor dengan mensurvei lokasi Batu Granit ke Nagari Tanjung Labuah Kecamatan Sumpur Kudus.

- Permasalahan/kendala yang dihadapi
 - 1) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Keterbatasan anggaran pendukung kegiatan dalam penyelenggaraan promosi dan mengikuti temu bisnis karena rasionalisasi.
 - 2) Belum adanya data peluang investasi seperti feasibility study, DED, master plan dalam mempromosikan suatu potensi investasi
 - 3) Belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksana event pameran yang diikuti oleh daerah tentang tindak lanjut atau manfaat dari pelaksana pameran.

3. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran program : Meningkatnya kualitas promosi dan pengendalian penanaman modal

Indikator Kinerja Program : Realisasi Investasi PMDN (Rp.Trilyun), Realisasi Investasi PMA (US\$ ribu)

Target : 11,42 trilyun; 197,4

Capaian : 12,02 trilyun; 197,4

- 1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal



Indikator kinerja kegiatan : Persentase Pemantauan pelaksanaan penanaman modal; Persentase Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; Persentase Pengawasan Pelaksanaan PM

Target : 100%, 100%, 100%

Capaian : 110%;183%;140%

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan
Disediakan anggaran Rp.62.524.550 dengan realisasi anggaran adalah Rp.50.682.028 atau 81,60%.
Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
 - Indikator kinerja
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan PM
 - Target dan Capaian Kinerja
Target dari sub kegiatan ini adalah 30 kegiatan usaha dokumen dan capaian kinerja adalah 33 kegiatan usaha.
 - Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan ini yaitu melakukan pemantauan ke lokasi proyek perusahaan penanaman modal dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi proyek perusahaan penanaman modal . Jumlah target Perusahaan Penanaman Modal yang dilakukan pemantauan adalah sebanyak 30 perusahaan dan terealisasi sebanyak 33 perusahaan (110.00%). Outputnya jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan.



Tabel 3.5
Pelaku usaha yang dilakukan pemantauan tahun 2022

No	Nama Pelaku Usaha	Bidang Usaha	Alamat
1	PT. Gallata Lestarindo	Industri Bahan Amelioran	Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru
2	PT. Telabang Rokan Indonesia	Industri penyamakan kulit	Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
3	CV. Talang Malintang	Penggalian batu kapur	Nagari Siaur, Kecamatan Kamang Baru
4	CV. Anjora	Kontraktor	Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII
5	PT. Alam Prima Riau	Real Estate	Nagari Mangkudu Kodok, Kecamatan Koto VII
6	CV. Dodo	Konstruksi	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
7	CV. Air Ganing	Konstruksi	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
8	CV Akbar Asraf (AA)	Konstruksi Jalan	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
9	CV. CEMPAKA MOTOR	Perdagangan eceran sepeda motor baru	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
10	CV. Jaya Sahabat	Konstruksi Jalan	Nagari taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang
11	PT Grha Ferry Industri	Penggalian batu kapur/ gamping	Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang
12	Perusda Kinantan (Hotel Bukit Gadang)	Hotel	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
13	PT Inti Alam Jaya	Perdagangan Besar Bahan Bakar (SPBU)	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
14	CV Mentari Terang Abadi	Dekorasi Interior	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
15	Perusda Kinantan (SPBU)	Perdagangan Besar Bahan Bakar (SPBU)	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
16	PT Inti Alam Abadi	Perdagangan bahan bakar padat, cair dan gas	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
17	Wisma Mentari	Hotel	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung



18	CV Radhit	Pertambangan Mineral	Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang
19	CV Kingdom F4	Konstruksi	Nagari Jambu Lipo, Kecamatan Lubuk Tarok
20	CV Centrall F4	Konstruksi	Nagari Jambu Lipo, Kecamatan Lubuk Tarok
21	PT Triguna Migas	Perdagangan Besar Bahan Bakar (SPBU)	Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang
22	PT Tanjung Gadang Sehati	Perdagangan Besar Bahan Bakar (SPBU)	Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang
23	PT Padang Sumatera Sawindo	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Nagari Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang
24	PT Surya Padang Khatulistiwa	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kecamatan Tanjung Gadang
25	PT Matahari Lintang Khatulistiwa	Real Estate	Nagari Mangkudu Kodok, Kecamatan Koto VII
26	CV Anugrah	Konstruksi	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
27	CV Galaxy Andalas	Konstruksi	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
28	PT Miyor Prima Abadi	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
29	PT Allied Indo Coal Jaya	Pertambangan batu bara	Nagari Bukit Bual, Kecamatan Koto VII
30	PT Air Ganing City	Real Estate	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
31	PT Mahakarya Sembilan Sembilan	Kontraktor	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
32	PT Mahakarya Amanah Sejahtera	Kontraktor	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
33	PT Kualitas Insan Amaliah	Real Estate	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung

- Permasalahan/kendala yang dihadapi
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM.

Gambar 3.4
Pemantauan yang dilakukan ke pelaku usaha



b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran Rp.351.055.100,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp.303.050.159,00 atau 86,33%.

Untuk realisasi fisik sebesar 100%.

- Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan PM

- Target dan Capaian Kinerja

Target dari sub kegiatan ini adalah 234 pelaku usaha dan capaian kinerja adalah 429 pelaku usaha.

- Bentuk Kegiatan

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sijunjung sebanyak 17 pelaku usaha. Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan langsung ke lokasi proyek perusahaan, membimbing pelaku usaha dalam penyampaian laporan LKPM secara online dan



memfasilitasi pelaku usaha dalam imigrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA dan melakukan pembinaan agar melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai perizinan yang diperoleh oleh pelaku usaha dengan mempertimbangkan lingkungan masyarakat sekitar.

2. Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha dan Pengurus Koperasi se Kabupaten Sijunjung dengan Jumlah Peserta 304 orang. Kegiatan sosialisasi dan bimtek OSS di adakan empat angkatan yang terdiri dari 2 angkatan sosialisasi yang di hadiri oleh pelaku usaha seKabupaten Sijunjung yang diadakan di Hotel Sahid Bukit Gadang dan di Wahana Telabang Sakti yang di hadiri oleh pelaku usaha sekecamatan Kamang baru. Narasumber dari DPMPTSP Kabupaten sijunjung dan dari perbankan dan dari owner citra swalayan. Dalam sosialisasi tersebut perbankan memaparkan tentang pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan untuk pengembangan usahanya sedangkan owner Citra Swalayan mensosialisasikan kunci sukses merintis usaha agar sukses. Dan owner citra swalayan juga membagi pengalamannya dalam maembangun citra swalayan.
 - Bimtek OSS di Hadiri oleh duta perizinan Kecamatan dan Duta Perizinan Nagari. Dengan nara sumber dari DPMPTSP Kabupaten dan DPMPTSP Propinsi sumatera barat. dimana nantinya duta perizinan ini akan memfasilitasi pelaku usaha dalam mengurus perizinan khusus yang beriko rendah, agar tidak terlalu jauh ke ibu kota kabupaten untuk efektifitas waktu dan biaya.
 - Sosialisasi Implementasi Angkatan VII dihadiri oleh pegurus koperasi seKabupaten Sijunjung, dengan narasumber dari DPMPTSP Propinsi Sumatera barat.
3. Bimbingan Teknis LKPM Online bagi pelaku usaha seKabupaten Sijunjung dengan jumlah peserta 108 orang. Bimtek di dilaksanakan di Hotel Sahid Bukik Gadang dan di wahana Telabang Sakti Kamang Baru. Dengan narasumber dari DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat yang membimbing langsung pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM secara online.

4. Sepuluh penyelesaian masalah dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha untuk merealisasikan usahanya. Kegiatan ini memfasilitasi pelaku usaha dalam penyelesaian masalah perizinan dan menerima pengaduan masyarakat pencemaran lingkungan dari pelaku usaha. Dan memfalitasi penyelesaian permasalahan tersebut.

Gambar 3.5
Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha



- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan
Disediakan anggaran Rp.200.634.100 dengan realisasi anggaran adalah Rp.157.890.135 atau 78,50%.
Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
 - Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan ini yaitu melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Sijunjung. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan dengan cara melakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan. Jumlah target perusahaan penanaman modal yang dilakukan pengawasan adalah sebanyak 75 perusahaan dan terealisasi sebanyak 105 perusahaan (140%). Outputnya jumlah perusahaan yang diawasi.



Tabel 3.6
Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan tahun 2022

NO	Nama Pelaku Usaha	Bidang Usaha	Alamat
1	CV Air Ganing City	Real stat (kontraktor)	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
2	CV Akbar Asraf	Konstruksi jalan	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
3	CV Ampi Jaya	Perdagangan umum jasa konstruksi	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
4	CV Anjora Group	Konstraktor	Koto VII
5	CV Anugrah FF	Konstruksi gedung pendidikan	Nagari Aia Amo, Kecamatan Kamang Baru
6	Anugrah Teknik Jaya	Konstruksi	Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru
7	CV Bina Karya Mandiri	Konstraktor	Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung
8	CV Cempaka Motor	Perdagangan eceran sepeda motor baru	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
9	CV Darma Samudra	Konstruksi	Nagari Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang
10	CV Farhan Kago	Konstraktor	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
11	CV Fifa Karya	Konstruksi	Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung
12	CV Gasefa	Perdagangan eceran bahan bakar	Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII
13	CV Halfa	Konstruksi	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
14	CV Iwihan Mandiri	Perkebunan buah kelapa sawit	Kamang Baru
15	CV Kaknome	Konstruksi	Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang
16	CV Mahligai tiga pintu	Perdagangan besar alas kaki	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
17	CV Mama	Konstruksi gedung	Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang
18	CV Mentari Terang Abadi	Dekorasi interior	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
19	CV Mitra Saiyo	Bidang konstruksi	Nagari Sibisir, Kecamatan Sijunjung
20	CV Noerul Fitri El	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak	Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
21	CV Ombak Sariau	Konstruksi gedung kesehatan	Nagari Pamuatan, Kecamatan IV Nagari



22	CV Ombak Simanau	Konstruksi gedung pendidikan	Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung
23	CV Pasma Karya	Dekorasi eksterior	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
24	CV Putra Patopang	Penyewaan alat berat	Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII
25	CV Putri Melayu	Konstruksi gedung perkantoran	Nagari Silongo, Kecamatan Lubuk Tarok
26	CV Radhit	Pertambangan mineral	Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang
27	CV Rian	Kontraktor	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
28	CV Sanicare Mitra Cemerlang	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII
29	CV Suer	Perdagangan besar atas dasar balas jasa	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
30	CV Sulthan Zayan Bersaudara	Kontraktor	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
31	CV Sumber Jaya Mandiri	Kontraktor	Nagari Silongo, Kecamatan Lubuk Tarok
32	CV Sumber Karya	Kontraktor	Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang
33	CV Sumua Nan Janiah	Konstruksi gedung perkantoran	Nagari Aia Amo, Kecamatan Kamang Baru
34	CV Sumur Kincir	Konstruksi gedung pendidikan	Nagari Sijunjung
35	CV Talang Malintang	Penggalian batu kapur	Nagari Siaur, Kecamatan Kamang Baru
36	CV Tiga Putra	Konstruksi gedung sekolah	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
37	CV Tjahaja Baru	Perdagangan enceran sepeda motor baru	Kamang Baru
38	CV Trinanda	Konstruksi	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
39	IPK Yunedi	Industri penggergajian kayu	Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII
40	IPKL Lansek Profil	Industri furniture dari kayu	Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru
41	Karya Putra Profil	Industri furniture dari kayu	Nagari Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru
42	Klinik Kurnia Medika II	Aktivitas klinik swasta	Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru
43	KUD Kunanagan	Pertambangan batu bara	Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan



			Kamang Baru
44	PT Limo Kaum Sumbang Lestari	Perdagangan eceran bahan	Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru
45	Perusda Kinantan	Spbu	Jl. M. Yamin, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
46	Perusda Kinantan (Hotel Sahid Bukit Gadang)	Hotel	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
47	PT Air Ganing City	Real estate	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
48	PT Alam Takambang Jadi Guru	Perdagangan besar bahan bakar kendaraan	Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru
49	PT Alya Amindra Abadi	Real estate	Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan
50	PT Amanah Sukses Bersama	Angkutan bus antar kota dalam provinsi (akpd)	
51	PT Andalas Bumi Lestari	Pengumpul limbah	Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang
52	PT Andalas Dolomit Sejahtera	Industri bahan amelioran	Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang
53	PT Anugrah Bina Sarana	Real estate	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
54	PT Anugrah Mitra Buana	Real state	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
55	PT Asa Daya Kreatif	Instalasi listrik	Kabupaten Sijunjung
56	PT Bina Enviro Nusa	Pengumpulan limbah berbahaya	Muaro
57	PT Bina Pratama Sakato jaya	Industri minyak mentah inti kelapa sawit	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
58	PT Briket Rokan Indonesia	Industri kimia pasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
59	PT Bukit Raya Mudisa	Pengusahaan hutan alkasia	Pekan Baru
60	PT Bumi Mutiara Sejati	Real state	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
61	PT Dekky Karyabestari	Stone crusher	Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru
62	PT Galatta Lestarindo	Industri bahan amelioran	Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru



63	PT Gina Ferry Industri	Penggalian batu kapur/ gamping	Pekan Baru
64	PT Gunung Berkat Sejahtera	Industri bahan amelioran	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
65	PT Gunung Salo Indah Mandiri	Bahan amelidran pembenah tanah	Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang
66	PT Hakaaston	Stone crusher	Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru
67	PT Inti Alam Abadi	Perdagangann bahan bakar padat, air dan gas	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
68	PT Inti Alam Jaya	Peerdagangan besar bahan bakar (spbu)	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
69	PT Karbindo Abesyapradhi	Pertambangan batu bara	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
70	PT Karbindo Internasional	Perkebunan kelapa sawit	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
71	PT Kemilau Permata Sawit	Industri minyak mentah inti kelapa sawit	Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru
72	PT Kualitas Insan Amalia	Konstruksi real estate	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
73	PT Lintas Paliko Gemilang	Perdagangann bahan bakar padat, air dan gas	Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus
74	PT Marsawa Indah Mandiri	Pertambangan batu bara	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
75	PT Matahari Lintang Khatulistiwa	Real estate	Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII
76	PT Maxima Utama Jaya	Real estate	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
77	PT Mitra Eba Pratama	Bidang angkutan sewa	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
78	PT Miyor Prima Abadi	Angkutan bermotor untuk barang khusus	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
79	PT Muaro Bodi Sehati	Real estate	Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari
80	PT Muaro jaya transport	Angkutan bus antar kota dan provinsi (akdp)	Muaro Sijunjung
81	PT Muji Karya Persada	Bidang konstruksi, real state	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
82	PT Mursil Jaya Trans	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak	Muaro Sijunjung



		opsi mobil, bus, truk	
83	PT Mutiara Timur Mandiri	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi	Padang Laweh
84	PT Pasura Bina Tambang	Aktivitas penunjang pertambangan dan pengalihan lainnya	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
85	PT Rejeki Piliang	Industri perdagangan besar bahan bakar	Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus
86	PT Rencana Baru Transport	Angkutan bus antar kota dan provinsi (akdp)	Muaro Sijunjung
87	PT Sadewa Karyatama	Industri bahan galian	Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus
88	PT Sawit Makmur Perkasa	Industri minyak mentah inti kelapa sawit	Nagari Aia Amo, Kecamatan Kamang Baru
89	PT Sumbar Andalas Sawit Indojoya	Perkebunan kelapa sawit	Padang/ Lubuk Tarok
90	PT Sumber Keberkahan Rezeki	Real estate	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
91	PT Surya Jaya Prakarsa Selaras	Industri bahan amelidran	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
92	PT Tampalo Prima Group	Angkutan bus antar kota dalam provinsi (akpd)	Koto VII
93	PT Tanjung Gadang Sehati	Perdagangan eceran bahan bakar minyak	Nagari Sibisir, Kecamatan Tanjung Gadang
94	PT Telabang Muda Indonesia	Perdagangan besar jertas dan karton	Kunpar
95	PT Telabang Rokan Indonesia	Industri penyamaan kulit	Komplek Telabang Wahana Sakti, Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
96	PT Triguna Migas	Perdagangan besar bahan bakar (spbu)	Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang
97	PT Wijoyo Ordina Properti	Real estate	Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari
98	RSKIA Haryanda	Rumah sakit ibu dan anak	Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung
99	Sangkis Profil	Industri pengolahan kayu	Nagari Pulasan, Kecamatan tanjung Gadang
100	Shindizaze	Perdagangan eceran mobil bekas	Nagari Kunanagan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru
101	Sukses Motor	Penjualan sparepart mobil	Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang

			Baru
102	UD Jaya Baru Sawmill	Bidang industri pengergajian kayu	Nagari Aia Amo, Kecamatan Kamang Baru
103	UD Yunda	Industri pengergajian kayu	Nagari Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru
104	Wisma Mentari	Hotel melati	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
105	YINDI	Kandang puyuh	Limo Koto, Kec. Koto VII Kab Sijunjung

Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah persentase pengawasan pelaksanaan penanaman modal

- Target dan Capaian Kinerja

Target dari kegiatan ini adalah pengawasan pelaksanaan penanaman modal

dan capaian kinerja adalah 140,00%

- Permasalahan/kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai dari Dana Alokasi Khusus Fasilitas Penanaman Modal Non Fisik yaitu masih ada komponen dana yang belum digunakan seperti penginapan.

Gambar 3.6
Pengawasan yang dilakukan ke pelaku usaha





B. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

Untuk mewujudkan sasaran strategi 2 (dua) Meningkatnya Daya Tarik Investasi ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran

Tabel 3.7
REALISASI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Kategori (2022)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	84	86.71	103.22	85.5	89.18	104.30	Sangat Baik
Rata-rata capaian indikator							104.30	Sangat Baik

Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2022

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 dengan target 85.5 terealisasi 89,18 dengan capaian 104,30% dan kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan capaian 86,71 sebesar 103,26%, terjadi peningkatan sebesar 1,08%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang diterima saat memproses izin usaha di DPMPSTP pada tahun 2022.

Faktor Pendukung :

1. Dengan telah selesainya pandemic covid-19 maka meningkatkan minat masyarakat untuk membuka usaha.



2. Sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai dan sesuai dengan standar pelayanan publik.
3. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh personil DPMPTSP.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini :

1. Sering terkendalanya dalam mengakses aplikasi OSS dan siCANTIK sehingga memperlambat proses penerbitan izin.
2. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan berusaha karena masih terjadinya keterlambatan dalam proses melengkapi persyaratan/pemenuhan komitmen perizinan.
3. Minimnya pendidikan dan pelatihan serta webinar baik secara offline ataupun online yang bisa diikuti oleh petugas baik front office dan back office.

Strategi pemecahan masalah :

1. Meningkatnya pelayanan keliling yang diberikan ke nagari-nagari
2. Memberikan pendampingan pada pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis 2 (dua) “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap adalah dengan melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran program : Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan public perizinan

Indikator Kinerja Program : Persentase peningkatan penerbitan perizinan penanaman modal yang diterbitkan ; Persentase pemenuhan standar Pelayanan Publik;

Target : 8%; 100%

Capaian : 155.51%; 89.18

- 1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
Sasaran kegiatan : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.



Indikator kinerja kegiatan : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : 85.5

Capaian : 89.18

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran 328.861.450 dengan realisasi anggaran adalah 283.525.460 atau 86,21%.

Untuk realisasi fisik sebesar 100%.

- Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

- Target dan Capaian Kinerja

Target dari kegiatan ini adalah 700 pelaku usaha dan capaian kinerja 900 pelaku usaha.

- Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan ini yaitu memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha (masyarakat) dalam proses penerbitan izin sehingga usaha yang mereka jalankan telah memiliki izin (legalitas usahanya telah diakui pemerintah). Berdasarkan aplikasi OSS RBA (*online Singel Submission*) izin usaha itu terbagi kedalam 4 resiko yaitu resiko tinggi, menengah tinggi, menengah rendah dan rendah.

Indikator kinerja

- Permasalahan/kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah jaringan internet yang sering tidak mendukung (bermasalah) sehingga kami tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pelaku usaha maupun masyarakat serta belum sempurna aplikasi yang terdapat dalam OSS RBA (Online Sistem Submission) tersebut sehingga izinnya tidak bisa kami proses atau tindak lanjuti.

Gambar 3.7
Proses penerbitan izin usaha



b. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Peizinan dan non Perizinan

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan
Disediakan anggaran Rp 93.491.800,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp.75.806.707,00 atau 81,08%.
Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
- Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
- Target dan Capaian Kinerja
Target dari kegiatan ini adalah 12 orang dan capaian kinerja adalah 12 orang.
- Bentuk Kegiatan
 1. Membuat link kuisioner suvei kepuasan masyarakat.
 2. Melakukan suvei kepuasan masyarakat .
 3. Membuat buku suvei kepuasan masyarakat caturwulan I, II,III.



4. Mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan sharing informasi dengan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dan Instansi/lembaga lainnya.
 5. Menyusun Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan dan Peraturan Bupati Sijunjung Standar pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Hukum Sedakab Sijunjung tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan dan Peraturan Bupati Sijunjung Standar pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 7. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Hukum Sedakab Sijunjung tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan dan Peraturan Bupati Sijunjung Standar pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 8. Melaksanakan harmonisasi dengan Kemenkum HAM tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan dan Peraturan Bupati Sijunjung Standar pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Permasalahan/kendala yang dihadapi
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah
 1. Untuk IKM : Link yang digunakan untuk pengisian kuisisioner IKM adalah melalui google form yang di bagikan kepada para pelaku usaha, namun terkadang pelaku usaha tidak mengisi link tersebut dengan alasan tidak memiliki paket data atau wifi.
 2. Perbub SPP Perizinan : berhubung dalam penyusunan perbub harus melalui harmonisasi dengan Kemenkum HAM maka Perbub SPP Perizinan memiliki banyak perubahan dari yang telah di konsultasikan dengan bagian hukum Setdakab.

Gambar 3.8
Pengisian survey kepuasan masyarakat secara manual



- c. Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan PM
- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan
Disediakan anggaran Rp48.180.700,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp41.124.000.00 atau 85.35%.
Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
 - Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan PM.
 - Target dan Capaian Kinerja
Target dari kegiatan ini adalah 10 kegiatan usaha dan capaian kinerja adalah 10 kegiatan usaha.
 - Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan pada sub kegiatan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal adalah melakukan pemantauan pemenuhan komitmen terhadap pelaku usaha yang mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi setelah perizinan mereka di terbitkan yang sesuai dengan perturan yang berlaku. Kegiatan pemantauan ini dilakukan kepada 10 pelaku usaha, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tinawan
 2. Berkah Yo Madu
 3. Decubi
 4. Keripik Buah Velly
 5. Apotek Zhivana
 6. Apotek Asri
 7. Apotek Andalas Medica



8. Apotek Family Ii
9. Toko Obat Assyifa
10. Toko Obat Amanda

Pada kegiatan pelayanan perizinan keliling bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pelayanan penerbitan izin secara langsung di nagari di Kabupaten Sijunjung. Penerbitan izin di tujukan bagi pelaku usaha yang mempunyai skala usaha Mikro dan Kecil. Kegiatan pelayanan perizinan keliling ini untuk tahun 2022 di lakukan pada 20 Nagari di 5 Kecamatan, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Koto VII

- ✓ Nagari Limo Koto
- ✓ Nagari Tanjung
- ✓ Nagari Palaluar
- ✓ Nagari Guguak

2. Kecamatan Kupitan

- ✓ Desa Kampung Baru
- ✓ Nagari Padang Sibusuk
- ✓ Nagari Batu Manjukur
- ✓ Nagari Pamuatan

3. Kecamatan Sumpur Kudus

- ✓ Nagari Kumanis
- ✓ Nagari Tanjung Bonai Aur
- ✓ Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan
- ✓ Nagari Sumpur Kudus
- ✓ Nagari Tanjung Labuah

4. Kecamatan Kamang Baru

- ✓ Nagari Kamang
- ✓ Nagari Muaro Takuang
- ✓ Nagari Sungai Lansek
- ✓ Nagari Sungai Batuang
- ✓ Nagari Siaur
- ✓ Nagari Padang Tarok

5. Kecamatan Sijunjung

✓ Nagari Durian Gadang

- Permasalahan/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini mengalami kendala karena kurangnya anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan ini, yang mengakibatkan terbatas jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan mereka.

Gambar 3.9
Pelaksanaan izin keliling yang dilakukan ke nagari-nagari



2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sasaran program : Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan public perizinan

Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Layanan data dan informasi

Target : 81

Capaian : 81.67

- 1) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatnya kemudahan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang valid dan akurat

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

Target : 1 dokumen

Capaian : 1 dokumen



- a. Sub kegiatan Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran Rp 39.467.200,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp 31.731.453,00 atau 80,40%.
Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
 - Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan
 - Target dan Capaian Kinerja

Target dari kegiatan ini adalah 1 dokumen/1 paket data dan capaian kinerja adalah 1 dokumen/1 paket data.
 - Bentuk Kegiatan
 - a. Mengumpulkan data Membuat Rekapitulasi izin bulanan baik yang terbit di OSS RBA maupun yang terbit pada Sicantik Cloud
 - b. Menyusun buku data base perizinan semester I dan II
 - c. Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan SIPD TA. 2022 secara berkala;
 - d. Mengikuti rapat koordinasi, melaksanakan konsultasi dan sharing informasi dengan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dan Instansi/lembaga lainnya.
 - e. Penyusunan dan pelaporan jumlah izin yang terbit di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022.
 - Permasalahan/kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah : kesulitan untuk mengetahui jumlah data seluruh pelaku usaha yang telah memiliki izin dikarenakan aplikasi OSS RBA bisa di akses siapa saja dan untuk kategori resiko menengah rendah dan rendah bisa langsung terbit tanpa adanya persetujuan dari OPD Teknis.



Tabel 3.8
Rekapitulasi Penerbitan Izin Per Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Tahun 2022

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN	KET
1	Izin Operasional Klinik	3	Manual
2	Surat Izin Praktek Bidan	178	SiCantik
3	Surat Izin Praktek Perawat	117	SiCantik
4	Surat Izin Praktek Radiografer	3	Manual
5	Surat Izin Praktek TGz	25	Manual
6	Surat Izin Praktek ATLM	20	Manual
7	Surat Izin Praktek TTK	33	SiCantik
9	Surat Izin Praktek Apoteker	11	SiCantik
10	Surat Izin Praktek Dokter	92	SiCantik
16	Surat Izin Praktik Dokter Internsip (SIPDI)	16	Manual
17	SPP-IRT	7	Manual
18	Surat Izin Praktik Elektromedis	2	Manual
20	Surat Izin Praktik Pelayanan Darah	1	Manual
21	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	8	Manual
22	Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)	5	Manual
23	Surat Izin Praktek Rekam Medis	5	Manual
24	Surat Izin Praktik Fisio Terapis (SIPF)	8	Manual
25	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)	2	Manual
26	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	10	Manual
27	PKBM, TK dan KB	47	SiCantik
28	SD dan SMP	2	Manual
29	PBG	86	SIMBG
30	PKKPR Non Berusaha	1	Manual
31	Dokter Hewan	<u>2</u>	Manual
		684	
	OSS		
1	NIB	1854	
2	Sertifikat Standar	234	
3	UMKU	48	
4	Izin	<u>12</u>	
		2148	
	JUMLAH	2832	

C. SASARAN STRATEGIS 3 : *Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi*

Pada sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi” dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Target nilai evaluasi akuntabilitas



kinerja tahun 2021 adalah 78 dengan realisasi 71,87 dengan capaian 92,14% dan kategori sangat baik.

Tabel 3.9
REALISASI AKUNTABILITAS ORGANISASI TAHUN 2021
DAN CAPAIAN TERHADAP RPJMD 2021–2026

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Kategori (2022)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2					4	5	7
1.	Nilai evaluasi Akuntabilitas Organisasi	75	70.79	94.38	78	71.87	92,14	Sangat baik
Rata-rata capaian indikator							92,14	Sangat baik

Indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 dengan target 78 terealisasi 71.87 dengan capaian 92.14% dan kategori sangat baik memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terjadi penurunan, capaian tahun 2020 dengan capaian 94.38% sehingga terjadi penurunan sebesar 2.24%.

Indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pada kinerja ini dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP Tahun 2021

No.	Aspek Penilaian	Target Bobot	Realisasi Bobot %
1	Aspek Perencana	30	24.04
2	Aspek Pengukuran Kinerja	25	15.31
3	Aspek Pelaporan Kinerja	15	11.33
4	Aspek Evaluasi Kinerja	10	6.32
5	Aspek Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20	14.88
Jumlah		100	71.87



Faktor pendukung dalam pencapaian sasaran ini :

1. Tujuan yang ditetapkan dalam renstra telah mencantumkan ukuran keberhasilan (indikator) kinerja tujuan
2. Renstra telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Renstra telah dipublikasikan pada website resmi pemerintah Kabupaten Sijunjung
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun
5. Kegiatan yang termuat dalam RKT sudah memenuhi kriteria untuk mencapai sasaran

Faktor hambatan dalam pencapaian sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

1. Belum tersedianya SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja
2. Belum adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap jenjang sampai pada individu dalam dokumen renstra.
3. Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan semesteran)
4. Belum dilakukan reviu secara berkala terhadap indikator Kinerja Utama
Belum tersedianya SOP tentang mekanisme monitoring target kinerja eselon III dan IV serta atasannya secara periodik dalam rangka pengukuran kinerja secara.

Strategi pemecahan masalah :

1. Menyeleraskan indikator kinerja individu dengan indikator kinerja utama (IKU).
2. Memastikan hasil pengukuran kinerja agar dapat digunakan sepenuhnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pengendalian/pemantauan kinerja berkala.
3. Memastikan agar dapat diterapkannya SOP mengenai mekanisme pemantauan atas kemajuan pencapaian kinerja terhadap kinerja serta hambatannya secara berjenjang.
4. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan/atau semesteran).

Dalam pencapaian indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan target kinerja sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indicator kinerja persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran sebesar dan jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu sebesar target 100%, capaian 100%.
 - b) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indicator kinerja persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu dan jumlah temuan pemeriksaan keuangan terhadap organisasi dengan target 100% dan capaian 100%.
 - c) Kegiatan kepegawaian perangkat daerah dengan indicator kinerja persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses tepat waktu dengan target 100% dan capaian kinerja 100%.
 - d) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indicator kinerja persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum dengan target 100% dan capaian 95%.
 - e) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indicator kegiatan persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan dengan target 100% dan capaian 100%.
 - f) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indicator kinerja persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100% dan capaian 100%.
 - g) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indicator kinerja persentase asset OPD dalam keadaan baik sebesar dengan target 100% dan capaian 100%.

Sub kegiatan yang mendukung sasaran ini :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub kegiatan penyediaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3.3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2022

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp5.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.930.000,00



atau sebesar 137,5% sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp5.434.139.827,00 dan terealisasi sebesar Rp4.777.397.688,00 atau sebesar 87,91%. Berikut merupakan penjabaran realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi keuangan program dan kegiatan tahun 2022.

3.3.1 Realisasi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu pemakaian Rumah Dinas.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	5.040.000,00	6.930.000,00	137,5

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terealisasi sebesar Rp6.930.000,00 atau mencapai 137,5% dari target sebesar Rp5.040.000,00 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Rumah Dinas.

Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021, pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan untuk penerbitan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2022 tidak lagi diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga realisasi pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berasal dari sewa rumah dinas. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 3.12
Realisasi PAD Dinas Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik (Turun)	
	2022	2021	Rp	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kendaraan Roda 2 Dan Kendaraan Roda 4	6.930.000	5.657.000	1.273.000	22
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	84.515.517	(84.515.517)	(100)
Jumlah	6.930.000	90.172.517	(83.242.517)	(88)

Dari tabel di atas dapat dilihat jika dibandingkan dengan tahun 2021 pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp83.242.517,00** atau sebesar **88%**. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.273.000,00 atau sebesar 22% yang disebabkan bertambahnya jumlah ASN yang tinggal di rumah dinas.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp84.515.517,00 atau sebesar 100%. Penurunan pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2022 disebabkan karena untuk penerbitan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak lagi diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait hal ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Retribusi perizinan tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung“. Retribusi bisa dipungut apabila telah diatur dalam Peraturan Daerah, apabila belum ditetapkan Peraturan Daerah, maka pemungutan Retribusi digratiskan.

Mengingat belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka sejak tanggal 4 September 2021 DPMPSTP tidak lagi memungut retribusi persetujuan bangunan Gedung. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah pada



pasal 14 ayat (3) bahwa DPMPSTP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah, maka pemungutan retribusi tidak lagi di kelola oleh Dinas PMPTSP dan telah di pindahkan ke OPD lain (Dinas PUPR).

3.3.2 Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 adalah sebesar Rp5.434.139.827,00 dan terealisasi sebesar Rp4.777.397.688,00 atau sebesar 87,91%. Anggaran yang tersedia digunakan untuk membiayai 6 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.13
Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Tahun 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih Kurang	
			Rp	%
Belanja Operasi	5.193.229.306	4.563.244.297	629.985.009	87,87%
Belanja Pegawai	2.561.540.632	2.287.098.091	274.442.541	89,29%
Belanja Barang dan Jasa	2.631.688.674	2.276.146.206	355.542.468	86,49%
Belanja Modal	240.910.521	214.153.391	26.757.130	88,89%
Belanja Peralatan dan Mesin	24.614.521	198.861.391	25.753.130	88,53%
Belanja Gedung dan Bangunan	16.296.000	15.292.000	1.004.000	93,83%
Total Belanja Operasi dan Modal	5.434.139.827	4.777.397.688	656.742.139	87,91%

Realisasi seluruh komponen belanja berada dibawah jumlah yang dianggarkan, dari dua komponen belanja yang ada yakni belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja operasi dalam tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.563.244.297,00 atau sekitar 87,87% dari total anggaran belanja Rp5.193.229.306,00 yang terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp2.287.098.091,00 dan belanja barang dan jasa sebesar



Rp2.276.146.206,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp214.153.391,00 atau sekitar 88,89% dari total anggaran belanja Rp240.910.521,00.

3.3.3 Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2022 adalah sebesar Rp5.434.139.827,00 dan terealisasi sebesar Rp4.777.397.688,00. Berdasarkan pengukuran Capaian Kinerja (*Performance Result*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 pencapaian target kinerja keuangan mencapai 87,91%. Secara rinci realisasi pencapaian target kinerja fisik dan keuangan tahun 2022 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan Program/ Kegiatan TA 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Kinerja		
			Keuangan		Fisik (%)	Target	Capaian
			(Rp.)	(%)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.803.954.127,00	3.351.093.194,00	88.95	100	100%	96%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.256.500,00	67.934.181,00	84.23	100	100%	100%
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	60.589.600,00	57.032.281,00	94.13	100	2 dokumen	2 dokumen
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.666.900,00	10.901.900,00	74.33	100	3 laporan	3 laporan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.637.424.832,00	2.349.868.774,00	84.92	100	100%	100%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.561.540.632,00	2.287.098.091,00	89.29	100	23 orang	21 orang
	b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.421.000,00	31.400.723,00	83.91	100	3 dok	3 dok (36 SPP, 36 SPM, 1754 SPJ)
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	38.463.200,00	31.369.960,00	81.56	100	14 laporan	14 laporan



	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.213.100,00	65.695.200,00	86.00	100	100%	90%
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.364.000,00	28.362.000,00	99.99	100	42 paket	42 paket
	b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.849.100,00	37.333.200,00	72.00	100	4 orang	3 orang
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.475.821,00	378.576.676,00	85.72	100	100%	95%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.977.200,00	7.716.700,00	85.96	100	5 komponen	5 komponen
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.375.096,00	127.839.641,00	84.45	100	9 paket	8 paket
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.060.075,00	51.687.800,00	95.61	100	6 paket	3 paket
	d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.686.250,00	16.141.600,00	74.43	100	6 paket	6 paket
	e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.855.800,00	17.647.000,00	98.83	100	5 paket	5 paket
	f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.875.650,00	11.506.700,00	96.89	100	12 laporan	12 laporan
	g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.645.750,00	146.037.235,00	63.87	100	30 laporan	42 laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.479.550,00	53.758.000,00	94.97	100	100%	100%
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.276.300,00	20.991.750,00	98.66	100	1 unit R2	1 unit R2
	b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	18.907.250,00	17.474.250,00	92.42	100	2 paket (1 unit kursi tamu, 3 lemari arsip)	2 paket (1 unit kursi tamu, 3 lemari arsip)
	c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.296.000,00	15.292.000,00	93.84	100	1 paket	1 paket
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.122.324,00	285.401.190,00	90.59	100	100%	100%



a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.009.924,00	114.466.290,00	98.67	100	3 laporan	3 laporan
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.645.400,00	32.093.566,00	78.96	100	2 laporan	2 laporan
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.467.000,00	138.841.334,00	94.15	100	12 laporan	12 laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.982.000,00	149.859.173,00	96.19	100	100%	100%
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.946.000,00	106.410.580,00	95.91	100	13 unit (4 Roda 4, 9 Roda 2)	13 unit (4 Roda 4, 9 Roda 2)
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.036.000,00	43.448.593,00	96.48	100	1 unit	1 unit
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	130.315.750,00	127.042.134,00	97.46	100	0 %	-75 %
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	66.742.250,00	65.799.903,00	98.59	100	100%	100%
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	66.742.250,00	65.799.903,00	98.59	100	1 dok	2 dok
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	63.573.500,00	61.242.231,00	96.33	100	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	63.573.500,00	61.242.231,00	96.33	100	1 dok	1 dok
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	375.655.050,00	355.848.374,00	94.73	100	3 investor	3 investor
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	375.655.050,00	355.848.374,00	94.73	100	100%	100%
Sub Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	375.655.050,00	355.848.374,00	94.73	100	1 dok	1 dok



	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	470.533.950,00	400.456.167,00	84.22	100	8;100%	155,51% ;89%
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	470.533.950,00	400.456.167,00	84.22	100	85.5	89.18
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	328.861.450,00	283.525.460,00	86.21	100	700 pelaku usaha	900 pelaku usaha
	b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	48.180.700,00	41.124.000,00	85.35	100	10 kegiatan usaha	10 kegiatan usaha
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	93.491.800,00	75.806.707,00	81.08	100	12 orang	12 orang
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	614.213.750,00	511.226.366,00	81.96	100		
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	614.213.750,00	511.226.366,00	81.96	100	100%	100%
	a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	62.524.550,00	50.682.028,00	81.06	100	30 kegiatan usaha	33 kegiatan usaha
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	351.055.100,00	303.050.159,00	86.33	100	234 kegiatan usaha	429 kegiatan usaha
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	200.634.100,00	157.494.179,00	78.50	100	75 kegiatan usaha	105 kegiatan usaha
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	39.467.200,00	31.731.453,00	80.40	100	81	81.67
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	39.467.200,00	31.731.453,00	80.40	100	1 paket data (perizina	1 paket data (perizina



Perizinan Terintegrasi Tingkat Kab/Kota yang pada Daerah						n dan non perizinan) ; 1 dokumen	n dan non perizinan) ; 1 dokumen
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	39.467.200,00	31.731.453,00	80.40	100	1 paket data (perizinan dan non perizinan)	1 paket data (perizinan dan non perizinan)	

3.3.4. Efektivitas Penggunaan Anggaran

Terkait efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Capaian Kinerja/ Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran	Persentase Efektifitas capaian Kinerja/ Sasaran $\geq 100\%$	Program/ Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5=(3-4)	6
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	208.76	91.38	117.38	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota Program Promosi Penanaman Modal 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman



					Modal Daerah Kab/Kota
					<p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota</p>
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	104.30	84.22	20.08	<p>Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>c. Sub Kegiatan Penyediaan</p>



					<p>Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota</p>
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi		88.95		<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>



					<p>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</p> <p>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan</p>
--	--	--	--	--	---



					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui efesiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian lebih dari 100% yaitu sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 1 (satu) masing-masing persentase efektivitas kinerja sebesar 117.38%, 20.08% dan ...%, ini menunjukkan bahwa efesiensi anggaran telah mencapai tingkat yang cukup tinggi.



BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sijunjung tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU DPMPTSP adalah persentase peningkatan realisasi penanaman modal, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan perizinan dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya realisasi penanaman modal dengan indicator kinerja persentase peningkatan realisasi penanaman modal dengan perhitungan realisasi penanaman modal tahun n dikurangi realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi dengan realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100. Untuk target tahun 2022 adalah sebesar 13% dengan realisasi 27.14% dan capaian 208,76% dengan nilai peringkat kinerja sangat baik. Artinya persentase peningkatan realisasi penanaman modal ini dapat dicapai 2x lipat dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan menghitung rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan 3x dalam setahun. Untuk tahun 2022 target nilai IKM adalah 85.5 dengan realisasi 89.18 dan capaian 104.30% dengan nilai peringkat kinerja sangat baik. Artinya masyarakat merasa puas dengan pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTS. Dalam pemberian pelayanan yang tidak bisa dikendalikan adalah mengenai waktu penyelesaian izin yang disampaikan masyarakat karena sering terkendalanya dalam mengakses aplikasi OSS dan siCANTIK sehingga memperlambat proses penerbitan izin.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya tata kelola organisasi dengan indicator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan melihat nilai laporan hasil evaluasi (LHE) LKjIP tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Pada tahun 2021 target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021 adalah 78 dengan realisasi 71,87 dengan capaian 92,14% dan kategori sangat



baik (nilai LHE tahun 2022 masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah kabupaten Sijunjung).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan ini semoga dapat menjadikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2022 dan sekaligus dapat dijadikan *feedback* untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya, disamping itu kiranya akan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan.

Muaro Sijunjung, Februari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Sijunjung

JAHERI, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19730311 199303 1 004